

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kemajuan ini tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial, cara masyarakat berkomunikasi, serta bentuk partisipasi publik dalam ruang sosial dan politik. Di era modern, komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dukungan perangkat teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu perangkat yang paling dominan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah *smartphone*, yang terhubung dengan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, dan X (Twitter).

Media sosial telah menjadi ruang interaksi digital yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berkomunikasi, membangun relasi sosial, berbagi informasi, serta mengekspresikan identitas dan pandangan mereka secara luas (Rahma et al., 2021; Pranyoto & Geli, 2020). Dalam konteks ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai struktur sosial yang membentuk pola perilaku, budaya komunikasi, dan psikologi masyarakat (Bayer et al., 2020). Media sosial juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, menggerakkan perubahan sosial, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Kaplan dan Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*). Sementara itu, McQuail (2010) menjelaskan bahwa media sosial memperkuat peran individu sebagai produsen sekaligus konsumen informasi, sehingga batas antara penyampai pesan dan penerima pesan menjadi semakin kabur. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskursus publik, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan isu-isu

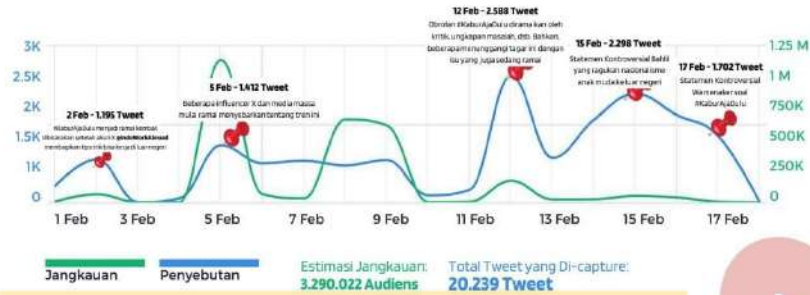
sosial.

Adapun salah satu fitur penting dalam media sosial adalah penggunaan *hashtag* atau tagar, yang berfungsi sebagai alat untuk mengkategorikan informasi, memperluas jangkauan pesan, serta membangun percakapan kolektif dalam ruang digital. *Hashtag* tidak hanya berfungsi secara teknis sebagai pengelompokan topik, tetapi juga sebagai simbol sosial yang memuat opini, ekspresi emosional, identitas kolektif, dan kritik terhadap realitas sosial. Dalam konteks komunikasi digital, *hashtag* dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi simbolik yang mengonstruksi makna sosial, membangun solidaritas, serta merepresentasikan ideologi tertentu dalam masyarakat digital.

Salah satu fenomena *hashtag* yang menarik perhatian publik Indonesia adalah tagar #KaburAjaDulu. Pada awal tahun 2025, ruang media sosial Indonesia diramaikan oleh tagar ini yang dengan cepat menjadi viral di berbagai platform seperti X (dulu Twitter), TikTok, dan Instagram. Meski sepintas terdengar santai dan jenaka, tagar ini sesungguhnya merepresentasikan akumulasi keresahan yang dirasakan oleh banyak anak muda Indonesia. Tagar ini menjadi ekspresi digital dari rasa frustrasi, kekecewaan, dan kecemasan yang tumbuh di tengah situasi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks dan tidak stabil. Dr. Hemptri Suyatna, seorang dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol UGM), menyatakan bahwa fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan sikap kritis dan respons satir generasi muda terhadap situasi sosial politik negara saat ini (Universitas Gadjah Mada, 2025).

Popularitas tagar #KaburAjaDulu mulai meningkat sejak pertengahan Januari 2025 setelah diangkat oleh akun-akun populer di platform X seperti @amouraxexa, @hrdbacot, dan @berlianidris, yang tercatat digunakan lebih dari 20.000 kali selama periode Januari hingga Februari 2025 (Disway.id, 2025). Tagar ini kemudian berkembang menjadi ruang solidaritas digital bagi warganet yang merasa tidak puas dengan kondisi domestik, sekaligus sebagai media berbagi informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, beasiswa, serta pengalaman diaspora.

PERSEBARAN TWEET #KABURAJADULU DI X



04

Hashtag #MudaBicaraID
Menekankan Fenomena #KaburAjaDulu: 'Hopesless Mentality'
Salah satu Muta dan Masa Depan Indonesia Emas

Gambar 1. 1

Sumber: Muda Bicara ID

Fenomena #KaburAjaDulu merefleksikan bagaimana respons generasi muda terhadap realitas sosial-ekonomi Indonesia yang semakin kompleks dan instabil. Dorongan ekonomi menjadi salah satu faktor paling menonjol di balik tren ini karena misalnya upah rendah, biaya hidup yang meningkat, dan pasar kerja yang terbatas, yang menimbulkan rasa bahwa bertahan di dalam negeri bukan lagi pilihan yang rasional bagi banyak pemuda (Kumparan, 2025; Tirto, 2025). Lulusan perguruan tinggi dan profesional muda, yang seharusnya menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional, justru menjadi kelompok paling rentan terhadap dinamika ketenagakerjaan dan stagnansi ekonomi.

Adapun, jika melihat kondisi di Indonesia saat ini dalam konteks untuk memahami *hashtag* tersebut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menunjukkan adanya kondisi yang mencolok, di antaranya tingkat pengangguran nasional sebesar 4,76%, dengan pengangguran kaum muda (usia 15–24 tahun) mencapai 16,16%, yang mana ini lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional. Pengangguran di kalangan pemuda terdidik pun mencapai 5,39%, yang diperparah oleh inflasi tahunan sebesar 2,92% di 2025 dan terbatasnya peluang kerja yang layak. Selain faktor ekonomi, isu-isu sosial-politik seperti nepotisme, korupsi, pemotongan anggaran publik, juga isu terkait deforestasi turut memperburuk persepsi bahwa peluang untuk kehidupan bermartabat di dalam negeri semakin sempit.

Dengan demikian, fenomena ini menggambarkan adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan yang dapat dijelaskan melalui perspektif Teori *Relative Deprivation* oleh Gurr (1970), yang menyatakan bahwa harapan sosial yang tinggi namun tidak terpenuhi dapat memicu ketidakpuasan kolektif. Harapan akan mobilitas sosial dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh pendidikan tinggi tidak sejalan dengan kenyataan ekonomi yang stagnan dan penuh ketidakpastian. Akibatnya, muncul rasa frustrasi kolektif yang diekspresikan secara digital melalui tagar #KaburAjaDulu.

Dilihat secara demografis, Indonesia saat ini tengah berada dalam periode "bonus demografi" yang berarti proporsi jumlah usia produktif yang tinggi secara temporer (Afryapollo, 2025). Namun, jika kelompok usia produktif ini tidak memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak, peluang tersebut dapat berubah menjadi frustrasi sosial, *brain drain*, dan kekecewaan politik. Adapun studi kebijakan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yakni meningkatnya pengangguran terdidik, ketidaksesuaian keterampilan antara kurikulum perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja, serta bertambahnya jumlah warga terampil Indonesia yang mencari pekerjaan atau tinggal permanen di luar negeri (Yunitasari et al., 2021; Permatasari et al., 2024). Fenomena ini bahkan mendapat perhatian beberapa media asing seperti Channel News Asia, yang menyoroti tren migrasi massal dan meningkatnya *brain drain* di Indonesia.

Dalam kerangka migrasi *push-pull* oleh Everett Lee (1966), fenomena ini dapat dipahami sebagai interaksi antara faktor dorongan (*push*) seperti biaya pendidikan tinggi, pekerjaan yang tidak pasti, persepsi korupsi, dan ketidaksesuaian kebijakan, yang berpadu dengan faktor tarikan (*pull*) berupa upah yang lebih tinggi, peluang karier, dan keunggulan hukum di negara tujuan seperti Australia, Jepang, dan Singapura. Tagar #KaburAjaDulu mereformulasi dinamika ini melalui budaya daring, membentuk wacana pelarian kolektif yang bersifat performatif sekaligus aspiratif (Yunitasari et al., 2021).

Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara (IOM, 2024). Berdasarkan data United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA, 2020), terdapat sekitar 4,6 juta migran internasional dari Indonesia, dengan 44 persen di antaranya adalah perempuan (BPS, 2023; Kemenko PMK, 2023). Data dari Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) resmi pada tahun 2024 mencapai 297.434 orang, meningkat 8,17% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 274.965 orang (BP2MI, 2025). Namun angka tersebut belum mencakup pekerja migran tidak berdokumen yang diperkirakan mencapai antara 5 hingga 9 juta orang (IOM, 2024; World Bank, 2017).

Dari sisi arus keuangan, remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran Indonesia ke tanah air terus mengalami pertumbuhan signifikan. Bank Dunia mencatat bahwa remitansi Indonesia mencapai sekitar USD 15 miliar pada tahun 2024 serta USD 15,6 miliar pada tahun 2025 (World Bank, 2024). Nilai ini setara dengan sekitar 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (BPS, 2023). Remitansi bukan hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi jutaan keluarga migran di Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas makroekonomi nasional. Namun, ketergantungan pada remitansi juga mencerminkan kerentanan struktural dalam penciptaan lapangan kerja domestik.

Tren migrasi internasional Indonesia memperlihatkan pola yang semakin bergeser dari sekadar migrasi tenaga kerja informal menuju migrasi tenaga kerja terampil dan terdidik. Laporan BP2MI (2025) mencatat peningkatan sebesar 18% jumlah pemuda berusia 20 hingga 35 tahun yang memilih bekerja di luar negeri selama tahun 2024, dengan negara tujuan utama meliputi Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Jerman, yang didominasi sektor teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, serta manufaktur berteknologi tinggi. Data migrasi tenaga kerja berdasarkan sektor menunjukkan bahwa sektor teknologi menjadi penyumbang terbesar, di mana sedikitnya 8.500 tenaga ahli berpindah ke luar negeri dalam lima tahun terakhir, sementara lebih dari 5.200 tenaga medis juga telah meninggalkan Indonesia (Sarjito, 2025). Kondisi ini mengindikasikan fenomena *brain drain* yang potensial dan mengkhawatirkan bagi keberlanjutan pembangunan nasional (Fitria, 2025; Soetomo, 2023).

Faktor pendorong migrasi tenaga kerja terampil dari Indonesia bersifat multidimensional. Rata-rata upah minimum di Indonesia hanya berkisar USD 223 per bulan (Velocity Global, 2024), jauh di bawah upah yang ditawarkan negara-negara tujuan utama. Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-68 dari 142 negara dalam Rule of Law Index tahun 2024 dengan skor 0,53 (World Justice

Project, 2024), yang mencerminkan persepsi lemahnya supremasi hukum sebagai salah satu faktor pendorong migrasi. Keterbatasan infrastruktur penelitian, rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan, serta lingkungan kerja yang kurang kompetitif turut memperkuat daya tarik negara-negara maju di mata profesional Indonesia (Permatasari et al., 2024; Sarjito, 2025).

Fenomena *brain drain* yang dialami Indonesia bukanlah hal yang berdiri sendiri. Studi komparatif dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menunjukkan bahwa dinamika migrasi talenta sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara, jaringan diaspora, dan insentif kelembagaan (Tyson, 2019; Cheong et al., 2018). India dan Tiongkok, misalnya, telah berhasil mengembangkan strategi untuk mengkonversi *brain drain* menjadi *brain gain* melalui kebijakan repatriasi talenta, penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta keterlibatan diaspora secara terstruktur (Chacko, 2007). Indonesia, meskipun telah memiliki beberapa inisiatif seperti program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan penguatan kerja sama diaspora melalui berbagai kongres diaspora, belum sepenuhnya mampu membalikkan tren emigrasi tenaga terampil (Yunitasari et al., 2021).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BPS, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri, saat ini sedang mengembangkan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) sebagai respons atas fragmentasi dan inkonsistensi data migrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (BPS, 2023; Kemenko PMK, 2023). Inisiatif ini melibatkan kolaborasi dengan International Organization for Migration (IOM), International Labour Organization (ILO), dan berbagai kementerian/lembaga terkait, serta sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM) dan pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 (IOM, 2024).

Gelombang kecemasan ini juga bertepatan dengan aksi protes "Indonesia Gelap" pada Februari 2025, ketika mahasiswa dan masyarakat sipil memprotes pemangkasan anggaran besar-besaran untuk sektor penting, di antaranya sektor pendidikan dan kesehatan. Pemotongan anggaran hingga 20% di beberapa daerah dilakukan rupanya untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kementerian Keuangan RI, 2025). Dalam kerangka analisis kebijakan publik

(Dye, 2017), hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penetapan prioritas anggaran negara yang berbasis pada kebutuhan esensial masyarakat, khususnya generasi muda sebagai bagian dari investasi jangka panjang bangsa.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, tagar #KaburAjaDulu berkembang menjadi wacana alternatif di ruang publik digital. Banyak pengguna media sosial mulai mengeksplorasi opsi-opsi emigrasi atau relokasi ke negara-negara maju seperti Kanada, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Di sini, terjadi semacam *digital diaspora discourse* (Vertovec, 2009), yakni proses di mana wacana migrasi transnasional dibentuk, disebarluaskan, dan dipertukarkan dalam ruang *virtual* sebagai respons terhadap krisis domestik. Informasi seputar peluang studi, beasiswa, peluang kerja, hingga prosedur migrasi menjadi komoditas informasi yang dikonsumsi secara luas oleh publik.

Selain itu, ekspresi publik terkait #KaburAjaDulu juga muncul dalam bentuk konten satire dan humor. Hal semacam ini mencerminkan apa yang disebut James C. Scott sebagai "*weapons of the weak*" (Scott, 1985), yakni bentuk-bentuk perlawanan simbolik dan informal yang dilakukan oleh kelompok subordinat terhadap kekuasaan hegemonik. Prof. Bagong Suyanto, Sosiolog dari Universitas Airlangga, menafsirkan tren ini sebagai bentuk kegelisahan publik yang muncul di era digital, di mana media sosial menjadi ruang perlawanan simbolik terhadap kondisi sosial-politik yang dirasakan tidak memadai (UNAIR News, 2025). Studi terbaru mengkonseptualisasikan tagar ini sebagai "repertoar budaya resistensi", bukan sekadar ekspresi keinginan untuk pindah, melainkan penanda ketidakpuasan terhadap tata kelola dan kontrak sosial nasional (Koswara & Herlina, 2025; Trisno Aji, 2025).

Dua literatur pelengkap yang relevan dalam konteks ini. Pertama, kajian tentang aktivisme digital dan aksi konektif menunjukkan bahwa fitur media sosial memungkinkan bentuk kontestasi yang terfragmentasi dan dipersonalisasi, namun tetap menghasilkan bingkai kolektif dan narasi berkelanjutan (Bennett & Segerberg, 2013). Kedua, teori tentang resistensi keseharian dan transkrip tersembunyi (Scott, 1985) membantu menafsirkan taktik yang bersifat menghindar atau tidak konfrontatif, memilih untuk "pergi" atau secara publik berfantasi tentang pelarian merupakan bentuk kritik moral dan modalitas subversif ketika protes langsung dianggap mahal atau tidak efektif.

Adapun respons pemerintah terhadap tren ini beragam. Beberapa pejabat mengakui adanya frustrasi yang terjadi dan mengusulkan pelatihan vokasi serta program keterampilan sebagai bentuk dukungan terhadap anak muda. Namun di sisi lain, muncul juga nada kritis yang mempertanyakan semangat nasionalisme mereka yang ingin "hijrah" ke luar negeri (Simbolon, 2025). Di luar institusi negara, para akademisi dan pengamat melihat tren ini sebagai peringatan dini atas potensi apa yang disebut Bhagwati dan Hamada (1974) sebagai *brain drain*, yaitu migrasi talenta unggul karena minimnya peluang dan dukungan dalam negeri. Meskipun ada kampanye tandingan seperti "Kerja di Sini Aja" yang mengajak anak muda untuk tetap optimis dan berkontribusi di Indonesia serta juga #PergiMigranPulangJuragan (Detik, 2025; Kompas, 2025), namun hal tersebut belum berhasil membalikkan keadaan.

Kekosongan dalam literatur akademik yang menjadi motivasi utama studi ini bersifat dua arah. Pertama, meskipun studi deskriptif dan analisis konten telah mendokumentasikan keberadaan dan karakteristik #KaburAjaDulu, hanya sedikit karya yang secara sistematis mengkonseptualisasikannya sebagai bentuk resistensi politik yang menghasilkan tantangan normatif terhadap legitimasi negara dan inklusi politik. Kedua, implikasi politik jangka panjang dari wacana pelarian yang meluas masih belum banyak ditelaah: apakah narasi pelarian yang masif melemahkan partisipasi warga dan menghasilkan *brain drain* yang merugikan ketahanan demokrasi, atau justru membuka peluang bagi mobilisasi diaspora dan keterlibatan sipil transnasional yang dapat menghasilkan bentuk-bentuk kontestasi politik baru serta potensi "*brain gain*" di masa mendatang?

Sejumlah analisis kebijakan dan evaluasi program menyarankan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk mengubah *brain drain* menjadi *brain gain*, misalnya, keterlibatan diaspora yang ditargetkan, peningkatan pendanaan riset, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri (Sarjito, 2025; Yunitasari et al., 2021). Namun demikian, keberadaan wacana pelarian yang terus menguat di ruang publik digital memperumit sinyal kebijakan yang ingin dikirimkan oleh negara. Ketika ekspresi massal tentang niat "kabur" menjadi narasi dominan, maka keputusan migrasi yang sebelumnya bersifat individual dapat berubah menjadi keputusan kolektif yang bersifat *self-fulfilling*. Dalam kondisi seperti ini, bahkan kebijakan yang progresif sekalipun berisiko kehilangan daya tariknya

karena telah kalah dalam medan persepsi dan imajinasi sosial, sekaligus menimbulkan rasa *trust issue* terhadap institusi negara.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena #KaburAjaDulu yang merebak di ruang digital Indonesia bukan sekadar ekspresi jenaka anak muda, melainkan cerminan dari adanya kontradiksi dalam membangun demokrasi pasca-Reformasi yang sehat. Generasi yang dibesarkan dalam semangat demokrasi dan kebebasan digital kini menghadapi sistem politik yang didominasi oleh oligarki, kebijakan yang inkonsisten, dan erosi meritokrasi. Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital, banyak anak muda justru merasa masa depan mereka semakin tidak menentu dan kehilangan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna.

Tagar ini berfungsi sebagai bentuk perlawanan infrapolitik sebagaimana yang digambarkan oleh (Scott, 1985) yang menandai adanya penolakan simbolik terhadap kontrak sosial melalui humor, unggahan anonim, dan bahasa berkode. Ia menciptakan ruang publik alternatif yang performatif dan transnasional (Bennett & Segerberg, 2013), menghindari konfrontasi langsung namun tetap mengkritik kegagalan negara. Dalam konteks represi politik, di mana pemimpin protes bisa dituduh makar (Human Rights Watch, 2025), strategi ini bisa menjadi cara yang aman untuk menyuarakan kekecewaan tanpa memicu risiko langsung.

Ketika pemuda terdidik memilih “keluar/pergi” daripada bersuara, ruang publik menyusut: aktivisme melemah, masyarakat sipil tergerus, dan tekanan reformasi berkurang. Berbagai studi telah menyoroti fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Lauren et al. (2025) menggunakan teori migrasi dorong–tarik dari Everett S. Lee (1966), sementara Kriswandi et al. (2025) menekankan kritik budaya melalui humor digital. Koswara dan Herlina (2025) mengaitkannya dengan transformasi komunikasi digital, dan Aji (2024) serta Sarjito (2025) menyoroti sinisme generasi muda terhadap institusi negara. Tyson (2019) mencatat pola serupa di Asia Tenggara terkait dominasi elite dan kehilangan talenta. Namun, belum banyak yang mengkaji #KaburAjaDulu sebagai bentuk perlawanan politik yang terstruktur dan berdampak sistemik.

Dengan menggabungkan teori perlawanan sehari-hari (Scott), teori *push-pull* (Lee), dan *exit, voice, loyal* (Hirschman), #KaburAjaDulu dapat dipahami sebagai respons terhadap penutupan struktur peluang politik. Bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030 (UNFPA, 2024) menuntut inklusi politik dan ekonomi. Namun di sisi lain, kebijakan seperti alokasi Rp 400 triliun untuk program MBG (2025–2029) dan UU Cipta Kerja, justru malah dapat memperkuat eksklusivitas, mengalihkan dana dari pendidikan dan melonggarkan perlindungan tenaga kerja.

Maka daripada itu, gerakan ini seakan menjadi simbol dari kontradiksi antara idealisme demokrasi dan realitas sosial-ekonomi. Fenomena ini menandai penarikan diri kolektif yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik. Dalam lanskap politik yang semakin tertutup, #KaburAjaDulu menciptakan ruang kontestasi baru yang tidak bergantung pada institusi formal. Maka, pertanyaan kunci yang muncul adalah: bagaimana #KaburAjaDulu berfungsi sebagai bentuk perlawanan politik di ruang digital, dan apa dampaknya terhadap masa depan demokrasi dan sosial-ekonomi Indonesia?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana #kaburajadulu merepresentasikan bentuk resistensi politik generasi muda terhadap kebijakan negara?
2. Bagaimana respon pemerintah terhadap munculnya fenomena #kaburajadulu dan apa implikasi terhadap ketahanan/stabilitas politik jangka panjang di Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah fenomena #KaburAjaDulu bukan sebagai humor internet yang remeh, melainkan sebagai ekspresi bermakna dari perlawanan politik dan emosional publik di era digital. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kritisisme di ruang digital mengungkap keretakan yang lebih dalam dalam struktur sosial ekonomi dan politik Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi struktural, kultural, dan emosional yang melatarbelakangi munculnya wacana #KaburAjaDulu.
2. Menganalisis bagaimana tagar tersebut berfungsi sebagai bentuk simbolik dari perlawanan sehari-hari yang mengubah tawa, sarkasme, dan penarikan diri menjadi komentar politik.
3. Mengkaji peran media digital sebagai cermin sekaligus penguat keluhan sosial, yang mengubah frustrasi individu menjadi suara kolektif.
4. Menelusuri bagaimana narasi #KaburAjaDulu mencerminkan aspirasi migrasi generasi muda, fenomena brain drain, dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
5. Mengevaluasi dampak potensial dari bentuk perlawanan digital ini terhadap lanskap kebijakan, partisipasi politik, dan ketahanan demokrasi jangka panjang di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk wawasan intelektual sekaligus relevansi praktis, dengan menjembatani dunia wacana digital dan realitas tata kelola serta budaya politik.

- Manfaat Teoretis

Penelitian ini memperluas batas pemahaman tentang perlawanan politik di abad ke-21. Dengan demikian, konsep perlawanan dari James C. Scott diperluas ke dalam ruang publik digital, menunjukkan bahwa ironi dan pelarian dapat memiliki daya subversif. Penelitian ini juga memperkaya diskusi global tentang aktivisme berbasis jaringan (Castells, 2012) melalui studi kasus Indonesia mengenai bagaimana *meme* berkembang menjadi kritik moral.

Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual untuk memahami politik generasi muda pasca-demokratis, suatu kondisi di mana warga tetap berkomunikasi, namun kehilangan keyakinan terhadap efektivitas partisipasi mereka. Temuan ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi studi politik komparatif di kawasan Asia Tenggara.

- Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi cermin diagnostik bagi para pembuat kebijakan. Jika #KaburAjaDulu mencerminkan keterasingan yang meluas, maka

hal ini menandakan perlunya reformulasi kebijakan, khususnya untuk pemuda, juga sistem pendidikan, dan strategi ketenagakerjaan. Para pengambil kebijakan sebaiknya tidak memandang tren ini sebagai bentuk nihilisme, melainkan sebagai peringatan dan *wake up call*, tapi juga sekaligus peluang untuk membangun kembali kepercayaan melalui inklusi dan integritas.

Bagi pendidik dan organisasi masyarakat sipil, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya literasi kewarganegaraan dan empati digital. Memahami narasi di balik kritisisme generasi muda yang dapat mendorong reformasi struktural, kebijakan, dan dialog sosial yang lebih inklusif. Bagi institusi demokrasi di Indonesia, penelitian ini memberikan peringatan bahwa keheningan dan ironi bisa sama kuatnya dengan aksi protes. Ketika suatu generasi memilih “kabur” daripada “bersuara,” maka kontrak sosial itu sendiri sedang dipertaruhkan. Terakhir, bagi kalangan akademik, tesis ini menyumbang model metodologis untuk menganalisis perlawanan simbolik dan kultural, dengan menunjukkan bahwa bahasa sehari-hari mampu mengungkap kebenaran politik yang mendalam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan yang sistematis dan terstruktur. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang menguraikan konteks kemunculan fenomena tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk resistensi politik generasi muda di Indonesia. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis menyajikan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, baik dari perspektif migrasi, aktivisme digital, maupun resistensi politik. Selain itu, bab ini menguraikan konsep dan teori yang digunakan, seperti teori resistensi politik James C. Scott, teori migrasi push–pull Everett S. Lee, kerangka exit, voice, loyalty dari Hirschman, serta konsep brain drain dan digital activism. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik validasi data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara metodologis guna menjawab pertanyaan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian mengenai bagaimana tagar #KaburAjaDulu merepresentasikan bentuk resistensi politik generasi muda, dinamika wacana yang terbentuk di media sosial, serta respons pemerintah dan aktor politik terhadap fenomena tersebut. Bab ini juga membahas implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari fenomena ini terhadap masa depan Indonesia, khususnya terkait brain drain, partisipasi politik, dan ketahanan demokrasi.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan penelitian selanjutnya. Bab ini juga menegaskan kontribusi teoretis dan praktis dari penelitian terhadap kajian politik dan komunikasi digital.

